

PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI DI ERA MODERN MENURUT HUKUM ISLAM

*Alfina Damayanti*¹

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jl. Pramuka No. 156 PO. Box 116 Ponorogo
alfinadamayanti53581@gmail.com

Abstract:

Professional zakat in the modern era is still a debate around the law that arises because there is no qat'i (firm) argument and it is strengthened that the term professional zakat is not included in things that must be zakat zakat. Not all scholars support the existence of zakat taken from the results of the business with unclear profession, size, nisab, and percentage. on the other hand, for those who support it, there are enough reasons that can be used as arguments, except that the benefits of zakat are very large against a fairly logical comparison, by saying that if zakat from profession is eliminated, there will be capitalist fiqh with the parable of a farmer who is obliged to pay zakat on his agricultural products despite his income. just barely, ironically why a pilot, for example, who earns tens of millions every month is not obliged to pay zakat. Profession's zakat during the time of the Prophet did not exist, the reason was that during the time of the Prophet, people were hunting for income in commerce and agriculture. Nowadays people have an

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, Indonesia.

income unlike those three problems, but they can with their expertise / profession.

Keywords: *Professional Zakat;, Nisab, Haul, Provisions, Modern Era.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama universal, tidak berisi ajaran tentang interaksi antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) saja, namun juga mengatur interaksi antara manusia dengan manusia (*hablum minan-nas*). Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, dan merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²

Konteks tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi, yaitu pekerjaan untuk mempermudah masyarakat dalam pemenuhan keperluan hidup. Pemenuhan keperluan/kebutuhan hidup seseorang sangat berhadapan bersama kekuatan bumi. Guna membangun tempat tinggal, mencari makanan dan minum, serta memperoleh sandang guna mengayomi kehidupan, kesejahteraan, serta kemakmuran hidup di bumi dan alam baqa'. Ekonomi Islam tidak diatur dalam agama Islam, namun ekonomi Islam lahir dari ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-quran dan Hadits.

Islam menjelaskan tentang jenis-jenis penerimaan baitul maal, yang terdiri atas: zakat, infaq, sadaqah, wakaf, fa'i, ghanimah, khums, dan kharaj. Berkaitan dengan penerimaan zakat. Zakat dapat berperan ganda dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 2.

Zakat merupakan suatu poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang ekonomi, moral, dan sosial. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan pada sebagian orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya jika ditangan pemiliknya. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang dimiliki.³

Zakat termasuk tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan dan seharusnya kembali diperhatikan, karena zakat merupakan potensi besar yang dapat dijadikan modal pembangunan negara, sebagaimana yang pernah dilakukan pendahulu Islam. Andai saja konsep zakat diterapkan dengan baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi. Zakat bukan hanya sekedar simbol, akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam. Tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi.⁴

Zakat profesi merupakan zakat yang ditujukan kepada gaji karyawan perusahaan karena pekerjaannya. Adapun agama Islam tidak begitu mewajibkan zakat seluruh harta benda, banyak ataupun sedikit, kecuali harta benda yang sudah mencapai nisab

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm.256.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 66.

bersih dari utang. Persoalan itu untuk menetapkan orang yang tergolong mampu, kemudian diwajibkan zakat.⁵

Masa Rasulullah SAW, sahabat, dan ulama klasik, jenis-jenis profesi masyarakat masih sederhana dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi saat itu. Berdasarkan hal tersebut ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya "*al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba"ah*" mengatakan "*Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut*".

Dalam jagat hukum Islam dikenal metode *ijtihad* yaitu penggalian hukum berdasarkan nash yang ada, dan *qiyas* (analogi hukum) dalam menentukan jenis-jenis harta obyek zakat di masa kini. Salah satu objek zakat yang timbul dari *ijtihad* adalah zakat perusahaan atau korporasi. Sebagian pendapat mengatakan tidak ada zakat perusahaan karena tidak ada dalil yang bersumber langsung dari Al Quran dan Sunnah Nabi. Pendapat lain mengatakan perusahaan yang dimiliki orang Islam wajib mengeluarkan zakat dari nilai laba tiap tahun dengan menggunakan alasan keumuman *nash syar'i* tentang zakat. Menurut pendapat kedua, hukum zakat perusahaan dikembalikan pada prinsip sumber zakat, ialah prinsip *an-nama'* atau *al istinma* (prinsip produktif) dan di luar kebutuhan pokok berdasarkan dalil-dalil umum zakat dalam Al Quran dan Sunnah. Perusahaan, mengecualikan perusahaan milik negara, dipandang sebagai obyek hukum dalam konteks kewajiban mengeluarkan zakat dengan

⁵ Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 305.

istilah *syakhsiiyyah ijtibariyah* atau hukum yang disamakan dengan orang.⁶

Saat ini profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan, namun zakat profesi masih menjadi perdebatan hukum Islam. Perdebatan tersebut muncul karena tidak ditemukan dalil yang *qat'i* (tegas), dan diperkuat bahwa istilah zakat profesi tidak termasuk ke dalam benda-benda yang wajib dizakatkan. Ketidakjelasan profesi, ukuran, nisab, dan presentasinya menyebabkan tidak semua ulama mendukung keberadaan zakat profesi ini. Oleh karena itu, cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam. Salah satu landasan hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi yaitu apabila penghasilan melalui profesi (pekerjaan) telah mencapai *nisab*, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Persoalan tersebut sudah didasarkan hukum yang sudah bersifat global, Allah berfirman di dalam Surah Al-Baqarah': 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)"

⁶

M.

fuad

nasar.

Artikel

<https://fuadnasar.wordpress.com/2017/04/28/kontekstualisasi-fiqih-zakat-di-era-modern/> diakses tanggal 17/11/2020

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji".

PEMBAHASAN

Penganalisaan strategi antara ibadah dengan dunia (bermuamalah) yang merupakan pendapat kontroversial seputar *ijtihad* zakat, asehingg soal beribadah tidak dengan daya pikir yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnatullah. Dengan begitu, menurut Jalaluddin dalam kaidah Ushul bahwa: "*apapun yang ditambah tambah dalam ibadah hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkan dalam Alquran dan as-sunnah.*" Berbeda dengan muamalah, menurut pendapat Khalaf "*asal sesuatu itu boleh, kecuali yang dilarang.*" Namun, sebagian anggota modernisasi yang menambahkan *qiyas* dalam hukum zakat profesi.⁷

Zakat profesi merupakan zakat yang ditujukan kepada gaji karyawan perusahaan karena pekerjaannya. Adapun Islam tidak begitu mewajibkan zakat seluruh harta bendanya, banyak ataupun sedikit, kecuali harta benda yang sudah mencapai nisab bersih dari utang. Persoalan itu untuk menetapkan orang yang tergolong mampu, kemudian diwajibkan zakat.⁸ Peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan: (1) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya (Muzakki). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 50.

⁸Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 305.

meningkatkan harga-harga komoditas, dan (2) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya. Al-Qur'an telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonom, sehingga melahirkan ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi para penerima. Sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat produktif.

Adapun landasan hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, sangat wajar bila tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat), baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus yang tidak diatur oleh *nash* (al-Quran dan al-Sunnah), maka dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan *qias* (analogi). Kewajiban berzakat berdasarkan keumuman terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqoroh: 267. *Pertama*, apabila penghasilan melalui profesi (pekerjaan) telah mencapai *nisab*, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Persoalan tersebut sudah didasarkan hukum-hukum yang sudah bersifat global, Allah berfirman didalam Surahh Al-Baqarah': 267 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Diungkapkan, hukum tersebut bahwa semua harta seseorang yang halal serta baik, seluruhnya diwajibkan mengeluarkan zakat. Syarat dan kadarnya sudah diterangkan dalam hadist Nabi SAW.

Kedua, terdapat pendapat ilmuwandi zaman dahulu atau saat ini, dimana terdapat istilah *al mall Al mustafhad* pada soal fiqih zakat. Selanjutnya, kesamarataan termasuk identitas dari ajaran agama Islam, penentuan keharusan mengeluarkan zakat dibanding penetapan keharusan zakat pada anggota yang spesifik. Para buruh pertanian sekarang keadaannya kurang beruntung secara global dimana ketetapan untuk mengeluarkan zakat berdasarkan hasil panen sawah yang sudah mencapai nishab. Dikarenakan sangat adil dengan nilai zakat penghasilan yang didapatkan dokter, pengacara, polisi, tentara, arsitek, dan pejabat tinggi lainnya.

Keempat, dengan berkembangnya kehidupan saat ini atau disebut dengan era modern khususnya umat manusia di bidang ekonomi, kegiatan profesi (keahlian) untuk mendapatkan penghasilan akan terus tumbuh di periode tertentu. Apalagi untuk membentuk aktivitas ekonomi dari paling utama dan sudah terjadi di daerah industri di masa modern.⁹

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa pendapatan/ penghasilan di dalam ilmu *fiqh* dapat dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*, yang berarti kegiatan penghasilan masyarakat berdasarkan usaha individu (kewirausahaan) berhubungan bersama pemerintah (pekerjadalam negeri), ataupun pekerja

⁹ Sudraja Ajatt, *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 305.

wiraswasta dan memperoleh upah pada periode relatif tetap dalam sekali satu bulan.¹⁰

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat harta dengan rela hati, sehingga target suci disyariatkan zakat dapat tercapai. Ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut yaitu: (1) Milik sempurna, (2) Berkembang secara riil atau estimasi., (3) Sampai nishab, (4) Melebihi kelebihan pokok, (5) Tidak terjadi zakat ganda, dan (6) Cukup haul. Syarat dalam pembayaran zakat profesi antara lain: (1) Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas, (2) Bebas dari kewajiban hutang, (3) Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun, dan (4) Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Adapun perolehan upah dalam takaran zakat profesi yaitu: *pertama*, penghasilan berasal pada pekerjaan di kantor, baik PNS ataupun swasta. Penghasilan dimana hasilnya bersifat aktif atau sama (penghasilan disetiap bulannya). *Kedua*, penghasilan pekerjaan secara berpengalaman di tempat pendidikan dan keahlian, karyawan memanfaatkan keahlian yang dimiliki, contoh: babershop, penjahit, penulis, *actor*, dokter, dan para seniman. Bersifat pasif (tidak pasti) biasanya terjadi pada pendapatan yang dihasilkan.¹¹

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 275.

¹¹ Arief Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat I*, (Prenada Media Group, 2006), hlm. 79.

Apabila dilihat dari sifat ketergantungannya, profesi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, ahli profesi independen yang tidak terikat dengan pemerintah, contohnya dokter, insinyur, penjahit, tukang batu, guru, dosen, dan para konsultan. *Kedua*, profesi terkait dengan pemerintah, badan usaha yang menerima gaji per bulan dan yayasan. Menurut sebagian ulama salah satunya *muawiyah*, Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas, kedua kelompok profesi di atas, baik yang wiraswasta atau pegawai yang terikat oleh suatu instansi, mereka dapat terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesi ketika menerima upah sebesar seperempat puluhnya. Jika utilitas itu dilakukan tidak akan ada lagi baginya kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada akhir tahun.¹²

Penafsiran ayat Al-qur'an Al-Jami' Qurthubi dalam menyatakan maksud dari kata *hakhun ma'lumm* (kebebasan yang pasti) Ad-Zaariyat termasuk kewajiban. Keseluruhan aktiva dan penghasilan didapatkan apabila telah dipenuhinya persyaratan untuk kewajiban berzakat, maka harus mengeluarkan zakat. Untuk sementara ada kesepakatan mengenai diwajibkannya zakat untuk profesi yang sudah cukup *nishb*, walaupun pendapat beda dalam persyaratan berzakat. Pada setiap keterampilan selagi halal, secara individu atau kelompok lainnya. Contohnya karyawan jika penghasilan sudah mencapai kadar diwajibkan untuk berzakat.

Nishb atau kadar waktu dalam ketetapan zhakat profesi yaitu: diperoleh telah ditentukannya untuk pengeluaran zakat profesi tergantung dengan *tamshil*. Zakat perdagangan waktu dikeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. *Nishb* 94 gram, ada yang menghitung menjadi 93,6 gram atau sama dengan 20 *mitsqal* atau 20 dinar dan setahun sekali waktu mengeluarkannya, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Contohnya, jika Ahmad berpenghasilan Rp 5.000.000 per bulan serta kebutuhan

¹² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 205.

pokok per bulan sebesar Rp 3.000.000, jadi besaran yang harus dikeluarkan sebesar 2.5 % (12) (2jt) atau= Rp 600.000 per tahun/ Rp 50.000 perbulan.¹³

Selanjutnya, apabila disesuaikan dengan zakat pertanian, *nishb* 5 *wasaq* gandum maupun padi 5 % kadarnya untuk yang memerlukan biaya dan 10 % untuk yang tanpa biaya, yang dikeluarkan di setiap mendapatkan gaji/penghasilan, satu bulan sekali misalnya. Contohnya pada kasus Ahmad di atas maka dari itu kewajiban Ahmad nilainya sebesar 5 % x 12 x Rp 2.000.000 atau sama dengan Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 per bulan. Kemudian apabila diklarifikasi dengan zakat barang temuan (*rikaz*), bahwa zakat yang dikeluarkan sebesar 20 % tanpa *nishb*. Contohnya Ahmad berkewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar 20 % x Rp 5.000.000 atau bernilai Rp. 100.000 per bulan.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi bisa diklarifikasi dengan dua hal sekaligus, seperti zakat emas dengan pertanian. *Nishb*nya diklarifikasi dengan zakat tani, senilai 5 *wasaq* (653 kg padi dan gandum) penerimanya di saat dikeluarkan. Contohnya, per bulan sekali pekerja menerima upah dan langsung berzakat, sama dengan zakat hasil panen yang dizakatkan disaat panen raya. Allah SWT menggambarkan dalam Surah al-An'am: 141.

Sebab disesuaikan zakat hasil panen, pada zakat profesi tidak terdapat ketentuan *haul*. Terdapat beberapa ulama yang mempersoalkan zakat profesi dan mata pencaharian yang terikat dengan *haul*. Begitu juga tentang *nishb*nya ada beberapa pendapat

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Inshani Press, 2002), hlm. 96.

¹⁴ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 90.

ilmuwan. Pertama mengharuskan cukup satu tahun, apabila sudah mencapai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya tersebut.¹⁵

Zakat profesi tidak perlu menunggu setelah satu tahun, akan tetapi per bulan pegawai setiap mendapat penghasilan pada kegiatan lain seperti hasil lukisan, kelompok musik, komedian, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa adapun batas minimal *nishbnya* yaitu Rp 300.000. Hal tersebut tergantung pada harga suatu benda yang dijadikan standar berkemungkinan harganya naik turun. Permasalahan yang begitu penting yaitu terdapat *ghairah diniyah* (semangat menghidupkan agama), untuk itu pengeluaran zakat dipandanginya tidak sebagai beban. Akan tetapi, hati nurani yang memang menyuruh demikian, karena mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya serta merasa sangat bahagia bila sudah melakukan/melaksanakan perintah-Nya.¹⁶

Kembali pada pengklarifikasian zakat pertanian dengan zakat profesi dilakukan karena terdapat kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Apabila hasil panennya disetiap musim secara individu yang tidak terkait dengan hasil pada sebelumnya, begitupun dengan gaji/upah yang diterimanya, terkait dengan penerimaan bulan pertama yang sangat berbeda.¹⁷

Kekayaan merupakan amanah dari Allah yang diberikan manusia untuk dipergunakan sebagai kebaikan. Amanah bagi seorang muslim dipahami sebagai suatu kepercayaan Allah. Maka pemahaman amanah ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaan sehingga kekayaan yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.

¹⁵ Ali Hasan. *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 73.

¹⁶ Ibid, hlm. 77.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Inshani Press, 2002), hlm. 97.

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka harus dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatan. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).¹⁸

Berbeda dengan ajaran ekonomi manapun, ajaran Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenai skala prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran Islam memberikan sebuah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat. Dalam kepemilikan aset yang dimiliki, pertama yang harus didistribusikan (dikeluarkan) dari jumlah seluruh aset adalah kebutuhan keluarga (1) jika masih ada surplus, dahulukan membayar hutang: (2) karena nabi menyatakan “menunda membayar hutang adalah zalim”. Disinilah letak keindahan Islam, yang menentukan bahwa: Islam melarang meminta tingkat pengembalian tertentu (*return*) dari uang yang dipiutangkan kepada orang lain. Sedangkan di sisi lain Islam melarang untuk menunda pembayaran utang pada kondisi *surplus*, karena adanya tambahan pada utang dan menunda pengembalian utang adalah sama-sama zalim.¹⁹

Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola

¹⁸ Heri Sudarsono, 1999. *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Ekonisia), hlm. 98-98.

¹⁹ Ibid, hlm. 140-141.

dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua akan menjadikan peningkatan perekonomian bangsa.

Pembayaran zakat oleh orang kaya bukan merupakan suatu bentuk pemihakkan kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu. Mereka hanya pembawa amanah. Mereka harus membelanjakannya menurut persyaratan amanah, yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang miskin. Apapun yang dilakukan oleh orang kaya untuk memperlihatkan keberpihakan terhadap si miskin, akan melukai perasaan mereka, mencerminkan ketidaktulusan dan menghancurkan pahala di akhirat (Al-Baqarah: 261-274).

Kemudian Allah menegaskan di dalam Al- Qur'an untuk tidak boleh *bakhil* terhadap apa yang telah diberikan. Sebagaimana dalam surat ali-Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Terjemahan:

"Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher –nya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah warisan langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." ²⁰

²⁰ Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, Ekonomi Islam (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 211.

KESIMPULAN

Zakat yang diserahkan berasal dari pekerjaan (profesi) merupakan pengertian dari zakat profesi. Landasan zakat profesi terdapat pada Al-qur'an dan Al-Hadist. Masalah tersebut tergantung dengan penganalogian yang sudah ada dan dilakukan. Kesimpulannya yaitu apabila zakat profesi dapat diklarifikasi dengan persoalan di atas pada zakat emas dengan pertanian. Maka dilihat dari sudut *nishb* dapat diklarifikasi/dianalogikan dengan zakat pertanian, besarnya senilai 5 *ausaqq*. Pendapat Qardhawi perhitungannya dalam zakat terdapat dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung (dipotong dengan kebutuhan pokok).

Profesi merupakan bentuk usaha yang relatif baru dan tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila tidak dijumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh *nash* (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan *qias* (analogi)

Zakat profesi merupakan zakat yang ditujukan kepada gaji karyawan perusahaan karena pekerjaannya. Adapun agama Islam tidak begitu mewajibkan zakat seluruh harta bendanya, banyak ataupun sedikit, kecuali harta benda yang sudah mencapai nisab bersih dari utang. Persoalan itu untuk menetapkan orang yang tergolong mampu, kemudian diwajibkan zakat. Adapun perolehan upah dalam takaran zakat profesi yaitu: *pertama* penghasilan berasal pada pekerjaan di kantor, baik PNS ataupun swasta. Penghasilan dimana hasilnya bersifat aktif atau sama (penghasilan disetiap

bulannya), *kedua* penghasilan pekerjaan secara berpengalaman ditempat pendidikan dan keahlian, para karyawan memanfaatkan keahlian yang dimiliki contohnya: babershop, penjahit, penulis, *actor*, dokter, dan para seniman. Bersifat pasif (tidak pasti) biasanya terjadi pada pendapatan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul, Ghofur, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib *Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Inshani Press, 2002.
- Hamid, Abdul, dan Saebani, Ahmad. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mannan, Muhammad, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemmporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.